

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Belanja Modal

2.1.1.1 Definisi Belanja Modal

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Kemudian menurut Nordiawan dan Hertianti (2010:71) Belanja Modal adalah pengeluaran yang memanfaatkan cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan organisasi sektor publik, yang selanjutnya akan menambah anggaran operasional untuk biaya perawatannya.

Lalu Erlina et al (2015:158) menyebutkan “Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli/bangun aset”.

Disisi lain dalam modul peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian

Keuangan Republik Indonesia pun menjelaskan bahwa belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Dengan pengertian di atas mengungkapkan bahwa belanja modal bertujuan untuk menambah aset tetap pemerintah daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan dengan cermat agar aset yang diperoleh tidak sia-sia dan tidak membebani keuangan daerah. Peningkatan aset juga berarti meningkatnya biaya pemeliharaan. Dalam konteks otonomi daerah, kewenangan yang diberikan harus dimanfaatkan secara optimal untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

2.1.1.2 Tujuan Belanja Modal

Tujuan belanja modal adalah untuk mengembangkan infrastruktur dan fasilitas yang mendukung kegiatan masyarakat, dengan harapan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Peningkatan ekonomi ini terjadi karena investasi yang didorong oleh fasilitas yang dibiayai melalui belanja modal. Sebagai bagian dari anggaran daerah, belanja modal memiliki peran krusial dalam memajukan pembangunan wilayah.

Mardiasmo (2002:46) menyatakan “Dalam era otonomi daerah, pemerintah daerah harus semakin mendekatkan diri pada pelayanan dasar publik dengan memaksimalkan sumber pendapatan daerahnya untuk peningkatan

fasilitas pelayanan publik”. Upaya untuk meningkatkan layanan publik dilakukan dengan mengalokasikan anggaran belanja modal secara optimal. Kenaikan belanja modal ini sebenarnya memberikan kesempatan lebih besar bagi pemerintah daerah untuk memenuhi indikator keberhasilan otonomi daerah.

Peningkatan fasilitas pelayanan publik, peningkatan kualitas pendidikan, dan perbaikan sarana transportasi yang didanai melalui belanja modal akan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Ketika masyarakat merasakan dampak positif dari pembangunan ini, kepercayaan terhadap pemerintah akan tumbuh, mendorong investasi, dan pada akhirnya berkontribusi sebagai sumber pendapatan daerah. Oleh karena itu, proporsi anggaran belanja daerah yang lebih banyak untuk kebutuhan belanja rutin tidak akan rasional.

2.1.1.3 Jenis Belanja Modal

Menurut Halim dan Kusufi (2014:107) dalam buku Akuntansi Keuangan Daerah dijelaskan bahwa belanja modal terbagi dalam:

1. Belanja Modal Tanah, pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan/penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.
2. Modal Peralatan dan Mesin, pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/pergantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua

belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

3. Modal Gedung dan Bangunan, pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.
4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan pembangunan, pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

Belanja Modal Fisik Lainnya, pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman.

2.1.1.4 Formula Perhitungan Belanja Modal

Seperti yang kita ketahui, belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih

dari satu periode akuntansi. Belanja modal diyakini sebagai jenis belanja yang berhubungan langsung dengan peningkatan produktivitas masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, analisis belanja modal sering dilakukan untuk mengevaluasi efektivitasnya, seperti pengaruhnya terhadap tingkat perekonomian suatu negara atau daerah, pengaruhnya terhadap tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat, dan sebagainya.

Terdapat juga rasio keserasian belanja modal yang merupakan perbandingan antara total realisasi Belanja Modal yang dibagi dengan realisasi total Belanja Daerah Pemerintah Daerah bersangkutan dalam satu tahun anggaran yang sama. Belanja modal pada dasarnya bersifat jangka menengah hingga jangka panjang yang biasanya memiliki bobot sekitar 5-20% dari total belanja daerah suatu Pemerintah Daerah (Mahmudi, 2010). Untuk mengetahui Rasio Belanja Modal dengan rumus berikut:

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

2.1.2 Pembangunan Manusia

2.1.2.1 Definisi Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia memiliki makna yang luas. Namun, ide dasar pembangunan manusia itu sendiri yaitu pertumbuhan positif dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lingkungan, serta perubahan dalam kesejahteraan manusianya. Beberapa ahli mengemukakan konsep pembangunan yang menyiratkan bahwa pembangunan memiliki aspek yang lebih luas dibandingkan dengan pembangunan konvensional, dan aspek tersebut menjadi

cikal bakal lahirnya konsep dari pembangunan manusia yang sampai saat ini digunakan oleh *United Nation Development Programme* (UNDP). Dengan menggunakan konsep dasar yang dikemukakan oleh para ahli, UNDP menggarisbawahi tentang ide dasar pembangunan manusia, yaitu :

a. Manusia

Pembangunan manusia harus berfokus pada peningkatan kualitas kehidupan yang dijalani oleh masyarakat dibandingkan dengan hanya mengandalkan asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi akan secara otomatis meningkatkan kesejahteraan mereka. Dalam sudut pandang ini, pertumbuhan ekonomi dilihat sebagai alat pembangunan, bukan tujuan akhir pembangunan.

b. Kesempatan

Pembangunan manusia pada prinsipnya memberikan lebih banyak kebebasan kepada manusia untuk menjalani kehidupan yang bermartabat. Hal ini berarti bahwa pembangunan manusia harus mampu mengembangkan kemampuan manusia dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk menggunakan kemampuannya. Misalnya, mendidik seorang perempuan secara tidak langsung akan membangun keterampilannya. Akan tetapi, hal tersebut tidak akan banyak berguna jika dia tidak diberi akses ke pekerjaan atau tidak memiliki keterampilan yang tepat dalam pasar tenaga kerja lokal. Tiga landasan penting dalam pembangunan manusia adalah berumur panjang, sehat dan kreatif, berpengetahuan luas, dan memiliki akses ke sumber daya yang dibutuhkan untuk standar hidup yang layak. Banyak hal lain yang juga

penting, terutama dalam membantu menciptakan kondisi yang tepat untuk pembangunan manusia.

c. Pilihan

Pembangunan manusia pada dasarnya membahas tentang lebih banyak pilihan. Pembangunan manusia memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menikmati pilihannya, bukan memaksa mereka memanfaatkannya. Tidak ada yang dapat menjamin kebahagiaan manusia dan pilihan yang dibuat setiap orang adalah tanggung jawab masing-masing. Oleh karena itu, pembangunan manusia harus mampu menciptakan lingkungan bagi masyarakat, baik secara individu maupun secara kolektif, untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki secara optimal. Pembangunan manusia juga harus memastikan bahwa masyarakat dapat memiliki kesempatan yang sama untuk menjalani kehidupan yang produktif dan kreatif.

Menurut UNDP (1995), “Pembangunan manusia adalah proses perluasan pilihan manusia. Pada semua level pembangunan, terdapat tiga pilihan mendasar yang harus dipenuhi, yaitu untuk hidup sehat dan panjang umur, memperoleh pendidikan, dan memiliki akses terhadap sumber-sumber kebutuhan agar dapat hidup layak”. Jika ketiga hal tersebut tidak terpenuhi, maka pilihan lain akan sulit diakses. Pilihan manusia sangat banyak dan berubah setiap saat, namun ketiga pilihan mendasar tersebut tetap menjadi prioritas dalam setiap level pembangunan.

Pembangunan manusia terdiri dari dua sisi yang saling mendukung, yaitu pembentukan kapasitas manusia dan pemanfaatannya. Pembentukan kapabilitas manusia mencakup upaya peningkatan kesehatan, pendidikan, dan kemampuan ekonomi, sedangkan pemanfaatannya mencakup penggunaan kapabilitas yang dimiliki, seperti untuk menikmati waktu luang, untuk tujuan produktif atau aktif dalam kegiatan budaya, sosial, dan urusan politik. Kedua sisi tersebut harus terbangun secara seimbang agar capaian pembangunan manusia menjadi optimal dan berkelanjutan.

2.1.2.2 Definisi Indeks Pembangunan Manusia

Pengukuran pembangunan manusia menggunakan indikator yang sudah dikenalkan oleh UNDP pada tahun 1990, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Menurut UNDP (1990), “Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah pengukuran perbandingan dari angka harapan hidup, harapan lama sekolah, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara di seluruh dunia”. UNDP mendefinisikan pembangunan manusia sebagai suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk. Dalam konsep tersebut, penduduk ditempatkan sebagai tujuan akhir (*the ultimate end*) sedangkan upaya pembangunan dipandang sebagai sarana (*principal means*) untuk mencapai tujuan itu. Terdapat empat hal pokok yang perlu diperhatikan, yaitu produktivitas, pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan (UNDP, 1995).

Pada *Human Development Report* (1990) diperkenalkan tiga indikator pembentuk Indeks Pembangunan Manusia yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Dari ketiga dimensi tersebut diturunkan

empat indikator yang digunakan dalam perhitungan IPM, yaitu angka harapan hidup saat lahir, angka melek huruf, gabungan angka partisipasi kasar, dan produk Domestik Bruto per kapita.

Secara berkala UNDP melakukan penyempurnaan dalam penghitungan IPM, dengan tetap menggunakan tiga dimensi yang sama yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, standar hidup layak namun menggunakan indikator yang berbeda, yaitu angka harapan hidup saat lahir, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan produk nasional bruto per kapita.

2.1.2.3 Komponen Indeks Pembangunan Manusia

Menurut UNDP (1995) dalam laporan pembangunan manusia (*Human Development Report*) setiap tahun sejak 1996 telah menerbitkan Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*) terdiri dari:

1. Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup adalah rata-rata perkiraan banyaknya tahun yang dapat ditempuh seseorang selama hidup. Perhitungan angka harapan hidup dilakukan secara tidak langsung (*indirect estimation*) dengan menggunakan dua data dasar yang meliputi rata-rata anak lahir hidup dan rata-rata anak yang masih hidup menurut kelompok umur wanita pernah kawin dari hasil Survei penduduk 2010. Besarnya nilai angka harapan hidup yang telah disepakati oleh semua pihak. Pada komponen angka harapan hidup batas terendah untuk perhitungan indeks adalah 25 tahun dan tertinggi 85 tahun sesuai dengan standar UNDP.

2. Angka Melek Hidup

Salah satu indikator yang dapat dijadikan ukuran kesejahteraan sosial yang merata adalah dengan melihat tinggi rendahnya persentase penduduk yang melek huruf. Tingkat melek huruf dapat dijadikan ukuran kemajuan suatu bangsa. Angka Melek Huruf (AMH) adalah presentase dari penduduk usia 15 tahun ke atas yang bisa membaca dan menulis huruf latin. Batas maksimum untuk angka melek huruf, adalah 100 sedangkan batas minimum 0 (standar UNDP). Hal ini menggambarkan kondisi 100 persen atau semua masyarakat mampu membaca dan menulis, dan nilai nol mencerminkan kondisi sebaliknya.

3. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk yang berusia 15 tahun ke atas di seluruh jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani atau sedang dijalani. Indikator ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang diduduki.

Batas maksimum untuk rata-rata lama sekolah adalah 15 tahun dan batas minimum sebesar 0 tahun (standar UNDP). Batas maksimum tersebut mengindikasikan bahwa rata-rata lulusan di wilayah tersebut adalah 15 tahun atau setara dengan lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA), sedangkan batas minimal 0 tahun mengindikasikan bahwa tidak ada satu pun yang sekolah di wilayah tersebut sehingga tidak ada satupun yang lulus atau menempuh jenjang pendidikan.

4. Paritas Daya Beli

Daya beli merupakan kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya untuk barang dan jasa. Kemampuan ini sangat dipengaruhi oleh harga-harga riil antar wilayah karena nilai tukar yang digunakan dapat menurunkan atau menaikkan nilai daya beli. Hal ini menyebabkan perbedaan kemampuan daya beli antara masyarakat satu wilayah dengan wilayah yang lainnya. Perbedaan kemampuan daya beli masyarakat antar wilayah tersebut maka perlu dilakukan standarisasi. Standarisasi misalnya satu rupiah di suatu wilayah memiliki daya beli yang sama dengan satu rupiah di Jakarta. Sehingga perbedaan kemampuan daya beli masyarakat antar wilayah dapat dibandingkan.

2.1.2.4 Formula Mengukuran Indeks Pembangunan Manusia

Dalam indeks Pembangunan Manusia (IPM) terdapat tiga komponen indikator yang digunakan untuk mengukur besar indeks pembangunan manusia suatu negara, yaitu:

1. Tingkat kesehatan diukur harapan hidup saat lahir (tingkat kematian bayi).
2. Tingkat pendidikan diukur dengan angka melek huruf (dengan bobot dua per tiga) dan rata-rata lama sekolah (dengan bobot sepertiga).
3. Standar kehidupan diukur dengan tingkat pengeluaran perkapita per tahun.

Untuk mengetahui Indeks Pembangunan Manusia dengan rumus berikut:

$$IPM = \frac{1}{3} Indeks X_1 + Indeks X_2 + Indeks X_3$$

Keterangan:

X_1 : Indeks Harapan Hidup

X_2 : Indeks Pendidikan ($\frac{2}{3}$ indeks melek huruf + $\frac{1}{3}$ indeks rata-rata lama sekolah)

X_3 : Indeks Standar Hidup Layak

Capaian Pembangunan Manusia di suatu wilayah pada waktu tertentu dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok, yaitu:

Tabel 2.1
Kriteria Capaian Pembangunan Manusia

Persentase IPM	Kategori
≥ 80	Sangat Tinggi
$70 \leq \text{IPM} < 80$	Tinggi
$60 \leq \text{IPM} < 70$	Sedang
< 60	Rendah

Sumber : Katalog IPM BPS

2.1.3 Pendapatan Asli Daerah

2.1.3.1 Definisi Pendapatan Asli Daerah

Menurut Halim (2007:96) “Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Kelompok Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yakni pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah”.

Menurut Erlina, dkk (2015:136) ”Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2022 disebutkan Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Dengan demikian, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta sumber-sumber PAD lain yang sah. Semua sumber

ini diperoleh dari wilayah setempat dan dikenakan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan penerimaan dari daerah sendiri agar dapat membantu membiayai sebagian kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang semakin berkembang. Hal ini akan mendorong kemandirian dan pertumbuhan ekonomi daerah secara nyata dan bertanggung jawab.

2.1.3.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah

Dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 31 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

1. Pajak Daerah

Pajak daerah dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah dan kesejahteraan rakyat. Dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2 disebutkan bahwa jenis pajak daerah adalah sebagai berikut:

a. Pajak Provinsi, terdiri dari:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor,
- 2) Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB),
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB),
- 4) Pajak Air Permukaan,
- 5) Pajak Rokok.

b. Pajak Kabupaten/ Kota, terdiri dari:

- 1) Pajak Hotel

- 2) Pajak Restoran,
- 3) Pajak Hiburan,
- 4) Pajak Reklame,
- 5) Pajak Penerangan Jalan,
- 6) Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan,
- 7) Pajak Parkir,
- 8) Pajak Air Tanah,
- 9) Pajak Sarang Burung Walet,
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan,
- 11) Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2. Retribusi Daerah

Dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 menyebutkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jenis retribusi daerah yaitu:

a. Retribusi Jasa Umum

meliputi retribusi pelayanan kesehatan, persampahan/ kebersihan, biaya KTP dan akte catatan sipil, pelayanan pemakaman, pelayanan parkir tepi jalan umum, pasar, pengujian kendaraan bermotor, pemeriksaan alat pemadam kebakaran, penggantian biaya cetak peta dan retribusi pelayanan pendidikan.

b. Retribusi Jasa Usaha

mencakup retribusi pemakaian kekayaan daerah, pasar/ grosir/ pertokoan, terminal, rumah potong hewan, tempat rekreasi/ olahraga dan sejenisnya.

c. Retribusi Perijinan Tertentu

meliputi retribusi izin mendirikan bangunan, ijin peruntukkan penggunaan tanah, ijin trayek dan lain-lain.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan yang berupa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri dari bagian laba atas penyertaan modal/investasi pada perusahaan milik daerah/Badan Usaha Milik Daerah, bagian laba atas penyertaan modal/investasi pada perusahaan milik pemerintah/Badan Usaha Milik Negara dan bagian laba atas penyertaan modal/investasi pada perusahaan milik swasta.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

Lain-lain PAD yang sah terdiri dari hasil penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, penerimaan bunga, penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah, komisi, potongan dan keuntungan selisih nilai tukar rupiah, denda retribusi, hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan dan lain-lain.

2.1.3.3 Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah

Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah adalah analisis pertumbuhan yang dilakukan untuk mengetahui kecenderungan baik berupa kenaikan ataupun penurunan kinerja selama kurun waktu tertentu (Mahmudi, 2019:91). Dinata (2013:7) menyatakan bahwa “Pertumbuhan PAD merupakan angka pertumbuhan PAD pada periode APBD dari tahun sebelumnya”. Adapun menurut Manafe et al., (2018:130) mengatakan bahwa “Pertumbuhan PAD adalah realisasi penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah dibagi realisasi periode sebelumnya”.

Mahmudi (2019:137) juga mengemukakan bahwa “Analisis pertumbuhan pendapatan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah pada tahun anggaran yang bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan positif atau negatif”. Jika kecenderungan meningkat maka pertumbuhan pendapatan dikatakan positif dan hal tersebut yang diharapkan. Namun, jika pendapatan menunjukkan penurunan maka berarti pertumbuhan pendapatan dikatakan negatif, hal ini menunjukkan terjadi penurunan kinerja pendapatan dan harus dicari penyebabnya, apakah karena faktor ekonomi makro yang berada diluar kendali pemerintah daerah atau karena pengelolaan keuangan daerah kurang baik.

2.1.3.4 Faktor Penghambat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah

Menurut Firdausy (2017:123) menyatakan bahwa terdapat enam permasalahan yang menjadi penghambat dalam upaya meningkatkan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah yaitu:

1. Umumnya pemerintah daerah belum mampu mengidentifikasi potensi sumber pendapatannya;
2. Sebagian daerah belum dapat mengoptimalkan penerimaan pajak daerah, retribusi daerah atau bahkan penerimaan dari hasil kekayaan daerah yang dipisahkan sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2004;
3. Daerah masih menganggap bahwa rendahnya pendapatan PAD sebagai akibat dari ruang gerak daerah yang terbatas untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana diatur dalam UU. No. 28 Tahun 2009. Daerah melihat banyak jenis objek pajak serta retribusi yang masih dapat diterapkan, tetapi tidak diperbolehkan oleh undang-undang;
4. Daerah masih melihat bahwa potensi pendapatan pajak yang besar masih diatur oleh pusat yaitu pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak rokok;
5. Kesiapan Sumber Daya Manusia baik dalam kualitas maupun kuantitas;
6. Lemahnya pengawasan atas pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Belum efektifnya pengawasan ini juga terjadi pada pengawasan kinerja pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Daerah.

2.1.3.5 Upaya Peningkatan Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah

Menurut Sofi (2021) terdapat tiga upaya yang perlu dilakukan oleh daerah dalam upaya meningkatkan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah yaitu:

1. Ekstensifikasi Pendapatan

Ekstensifikasi pendapatan daerah dapat dilakukan dengan pengelolaan

penerimaan baru serta penjaringan Wajib Pajak (WP)/ Wajib Retribusi baru. Pengelolaan sumber penerimaan baru terutama untuk lain-lain PAD yang sah karena untuk penerimaan dari DPRD sudah *close list*, artinya sudah dibatasi atas pemungutan pajak lain di luar pajak tersebut, sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009. Penjaringan wajib pajak baru dapat dilakukan melalui Kerjasama dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat untuk tukar menukar data pajak. Selain itu, untuk menarik minat yang mendaftar menjadi wajib pajak daerah diperlukan kemudahan dalam pendaftaran salah satunya bisa melalui sistem daring.

2. Intensifikasi Pendapatan

Intensifikasi pendapatan daerah dapat dilakukan dengan optimalisasi penerimaan sesuai potensi daerah serta optimalisasi penerimaan dari piutang. Salah satu kunci untuk mencapai potensi pajak daerah yaitu melalui pemuktahiran atau validasi data pajak daerah. Validasi data pajak daerah dapat dilakukan dengan pengecekan di lapangan secara bertahap apakah data wajib pajak masih sama atau sudah berubah. Jika terdapat perubahan perlu penyesuaian pada basis data. Untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) perlu dilakukan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) agar tidak terlalu jauh dari nilai pasar yang ada.

3. Penguatan Kelembagaan

Penguatan kelembagaan merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam optimalisasi penerimaan daerah. Penguatan kelembagaan dapat dilakukan melalui restrukturisasi organisasi sesuai kebutuhan daerah, peningkatan

kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), modernisasi administrasi perpajakan serta penyederhanaan proses bisnis. Modernisasi administrasi perpajakan daerah melalui penguatan mekanisme pemungutan pajak daerah yang dimulai dari pendataan, pendaftaran, pembayaran, pengawasan, penagihan hingga pemeriksaan.

2.1.3.6 Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah

Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dapat diukur secara kuantitatif. Pengukuran pertumbuhan ini menggunakan perbandingan antara total realisasi Pendapatan Asli Daerah yang dibagi dengan total Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah bersangkutan.. Menurut Mahmudi (2010:139) Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggaran mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif atau negatif. Dengan menghitung pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dapat diketahui persentase peningkatan ataupun penurunannya, sehingga pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dapat digunakan untuk mengukur Tingkat Pendapatan Asli Daerah. Analisis terhadap pertumbuhan PAD dilakukan untuk mengetahui tingkat PAD dengan rumus sebagai berikut:

$$G = \frac{PAD_t}{PD} \times 100\%$$

Keterangan:

G = Pertumbuhan PAD

PAD t = Realisasi PAD tahun yang dihitung

PD = Total Pendapatan Daerah

Menurut Halim (2004:163) "Laju pertumbuhan menunjukkan kemampuan daerah mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan daerah yang telah dicapai dari satu periode ke periode lainnya". Berikut ini adalah kriteria laju pertumbuhan:

Tabel 2.2
Kriteria Laju Pertumbuhan

Persentase	Kriteria
85 - 100%	Sangat Berhasil
70 – 85%	Berhasil
55 – 70%	Cukup Berhasil
30 – 55%	Kurang Berhasil
<30%	Tidak Berhasil

Sumber: Halim (2004:163)

2.1.4 Studi Empiris

Penelitian ini dilakukan dengan merujuk pada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik yang bersangkutan, antara lain:

1. Sembiring (2019) meneliti tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sumatera Utara. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan metode analisis data yang menggunakan data panel atau pooling least square (PLS). Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah dengan metode data panel yang merupakan penggabungan data *cross section* dan data *time series*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

2. Restiany (2019) meneliti tentang Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah Terhadap Pembangunan Manusia (Survei Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat). Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian observasi nonpartisipan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, dan Rasio Efektivitas Pajak Daerah mengalami fluktuasi setiap tahunnya sedangkan untuk Rasio Derajat Desentralisasi dan Pembangunan Manusia mengalami kenaikan setiap tahunnya. Secara parsial Rasio Derajat Desentralisasi berpengaruh positif signifikan terhadap Pembangunan Manusia. Sedangkan empat variabel independen yang lain tidak berpengaruh signifikan terhadap Pembangunan Manusia. Secara simultan semua variabel independen berpengaruh signifikan terhadap Pembangunan Manusia.
3. Junaidi et al., (2013) meneliti tentang *The Impact of Fiscal Decentralization on Local Economic Development in East Java*. Penelitian ini menggunakan alat analisis statistik SEM (*Structural Equation Modeling*) untuk mengidentifikasi pengaruh desentralisasi fiskal, pembangunan manusia pembangunan fisik, dan faktor-faktor input terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dan positif antara Desentralisasi Fiskal terhadap Pembangunan Manusia dan

menunjukkan efek negatif antara Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Lokal.

4. Andriana et al., (2018) dengan judul “Pengaruh Kemiskinan, PDRB, dan PAD terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur”, ditemukan bahwa kemiskinan berdampak negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jawa Timur. Sebaliknya, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki dampak positif dan signifikan terhadap peningkatan IPM. Oleh karena itu, kenaikan PDRB dan PAD diharapkan dapat meningkatkan tingkat IPM di Jawa Timur, sementara penurunan tingkat kemiskinan dapat berkontribusi pada peningkatan IPM di Jawa Timur.
5. Candrawati et al., (2020) dengan judul “Dampak Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Sumatera Barat”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tiga faktor memiliki pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tingkat kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi memberikan dampak negatif pada IPM, sementara pengangguran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penilaian IPM. Pengangguran mengacu pada individu yang tidak bekerja dan sedang aktif mencari pekerjaan.
6. Setyawan et al., (2019) dengan Judul “Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi serta Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Kasus 9 Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2008-2017). Hasil

penelitian menunjukkan Desentralisasi Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di 9 Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2008- 2017.

7. Defitri (2020) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Belanja Modal dan Belanja Pegawai terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Belanja Modal yang berdampak negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (TKKD) menunjukkan bahwa besarnya pengeluaran modal dapat berpengaruh terhadap kapasitas keuangan daerah untuk mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Sementara itu, Belanja Pegawai yang tidak memiliki dampak signifikan terhadap TKKD menunjukkan bahwa anggaran untuk gaji pegawai tidak berkontribusi pada kapasitas keuangan daerah untuk mendukung kegiatan-kegiatan tersebut.
8. Firiyani et al., (2021) dengan judul “Pengaruh PAD, DAU, Belanja Modal, Belanja Pegawai terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Tengah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memberikan dampak signifikan dan positif pada Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (TKKD) mengindikasikan bahwa pemerintah daerah dapat mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat dengan sumber daya yang dimilikinya. Sebaliknya, Dana Alokasi Umum (DAU) yang memiliki korelasi negatif yang signifikan dengan TKKD menunjukkan bahwa

pemerintah daerah yang menerima DAU dari pemerintah pusat cenderung memiliki tingkat kemandirian yang lebih rendah dalam pembiayaan kegiatan-kegiatan tersebut. Belanja Modal yang berkorelasi negatif dengan TKKD menggambarkan bahwa pengeluaran modal yang besar dapat mengurangi kemampuan daerah untuk membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Sementara itu, Belanja Pegawai yang tidak memiliki dampak signifikan terhadap TKKD menandakan bahwa pengeluaran untuk gaji pegawai tidak berperan dalam memengaruhi kemampuan daerah dalam pembiayaan kegiatan-kegiatan.

9. Wahyuni et al., (2018) dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Belanja Pegawai terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh positif dan signifikan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (TKKD) menandakan bahwa tingkat kemandirian keuangan suatu daerah cenderung meningkat seiring dengan peningkatan PAD. Sebaliknya, Belanja Modal memiliki pengaruh negatif, meskipun tidak signifikan, terhadap TKKD. Begitu juga, Belanja Pegawai menunjukkan pengaruh negatif terhadap TKKD, yang menyiratkan bahwa semakin tinggi belanja pegawai suatu daerah, semakin rendah tingkat kemandirian keuangannya.
10. Yusiawati et al., (2020) dengan judul “*Effect Of Investment, GRDP Percapita, and Original Local Government Revenue on Regional Financial Independence through Capital Expenditures as Intervening Variables*”. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa investasi memiliki dampak negatif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, sementara PDRB per kapita dan pendapatan asli daerah menunjukkan dampak positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Investasi dan Pendapatan Asli Daerah juga memberikan dampak positif dan signifikan pada belanja modal. PDRB per kapita berdampak negatif dan signifikan pada belanja modal.

11. Rasid et al., (2023) dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Pada Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi DKI Jakarta”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak memiliki dampak positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kemungkinan penyebabnya adalah kurangnya efektivitas dalam pemanfaatan PAD untuk mendukung kegiatan pembangunan dan pemerintahan daerah. Di sisi lain, Belanja Modal justru memberikan dampak negatif terhadap IPM, yang mungkin disebabkan oleh kurangnya efektivitas dalam menggunakan Belanja Modal untuk mendanai pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum. Meskipun demikian, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal tetap berperan dalam memengaruhi IPM, menunjukkan bahwa keduanya dapat memainkan peran penting dalam mempengaruhi kualitas hidup manusia di suatu wilayah.
12. Datail et al., (2020) dengan judul "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa

Timur”. Hasil penelitian menunjukkan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus secara positif dan signifikan berdampak pada Belanja Modal di Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur. Kedua faktor tersebut memiliki potensi untuk meningkatkan investasi dalam pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum di wilayah tersebut. Dana Alokasi Umum memberikan pengaruh positif terhadap Belanja Modal di Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur.

13. Kanaiya et al., (2020) dengan judul “Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Berpengaruh terhadap Belanja Modal Pemerintah”. Hasil penelitian menunjukkan Pendapatan Asli Daerah secara positif dan signifikan memengaruhi Belanja Modal Pemerintah, menunjukkan korelasi positif antara Pendapatan Asli Daerah dan tingkat Belanja Modal Pemerintah. Sebaliknya, Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Belanja Modal Pemerintah, mengindikasikan bahwa semakin tinggi Dana Alokasi Umum, semakin rendah Belanja Modal Pemerintah. Sementara itu, Dana Alokasi Khusus memiliki dampak positif terhadap Belanja Modal Pemerintah, menunjukkan bahwa semakin tinggi Dana Alokasi Khusus, semakin tinggi Belanja Modal Pemerintah.

14. Utomo et al., (2021) dengan judul “*The Effect of Capital Expenditures and General Allocation Funds on Local Revenue as an Intervening Variable in Districts and Cities in North Maluku Province*”. Hasil penelitian menunjukkan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Belanja Modal, secara individu, tidak

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Meskipun demikian, DAU memiliki pengaruh tidak langsung terhadap Kemandirian Keuangan Daerah melalui Pendapatan Asli Daerah. Belanja Modal yang memiliki pengaruh tidak langsung terhadap Kemandirian Keuangan Daerah melalui Pendapatan Asli Daerah.

15. Hanantoko (2020) dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Timur”. Hasil penelitian menunjukkan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Dana Perimbangan berpengaruh positif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Belanja Modal berpengaruh positif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal berpengaruh positif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga faktor tersebut dapat mempengaruhi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Timur.
16. Indrawahyuni (2020) dengan judul “Analisis Efektivitas dan Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat Efektivitas dan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar tergolong efektif, yang mana hal tersebut ditunjukkan dengan realisasi penerimaan PAD lebih besar daripada yang ditargetkan, dan pertumbuhan PAD mengalami peningkatan setiap tahunnya, dan meskipun terjadi penurunan tidak terlalu drastis.

17. Marsudi et al., (2019) dengan judul “Tingkat Kemandirian, Efisiensi, Efektivitas dan Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah: Kajian pada Provinsi Jawa Barat”. Hasil dari Uji pengaruh yang dilakukan menunjukkan bahwa kemandirian tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan PAD. Efisiensi berpengaruh negatif terhadap Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah. Efektivitas berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah . Dan tingkat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tergolong kecil dengan nilai rata rata 28,5%, yang mana hal tersebut akibat masih belum meratanya pembangunan di setiap wilayah.
18. Lhutfi et al., (2020) “*Do the Growth of Original Local Government Revenues and the Growth of Capital Expenditure Affect Fiscal Stress*”. Hasil penelitian menunjukkan secara simultan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Belanja Modal secara simultan berpengaruh terhadap *Fiscal Stress* di kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat. Secara Parsial pertumbuhan PAD berpengaruh negatif terhadap *Fiscal Stress* dan Pertumbuhan Belanja Modal berpengaruh tidak signifikan terhadap belanja modal di kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat.
19. Natoen et al., (2018) “Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan”. Hasil penelitian menunjukkan secara parsial variabel pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

20. Syifa et al., (2021) “Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Belanja Modal Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap *Fiscal Stress* Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Barat”. Hasil penelitian menunjukkan Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Fiscal Stress*. Pertumbuhan belanja modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Fiscal Stress*. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Fiscal Stress*.

Tabel 2.3
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis

No.	Nama Peneliti, Tahun, dan Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Sembiring. (2019). “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sumatera Utara”	Indeks Pembangunan Manusia, Pendapatan Asli Daerah	Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus	Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia.	Accumulat ed Journal, Vol. 1 No. 2 July 2019. ISSN:2656-4203
2	Restiany. (2019). “Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah Terhadap Pembangunan Manusia (Survei Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Manusia, Rasio Pendapatan Asli Daerah	Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas Pajak Daerah	Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, dan Rasio Efektivitas Pajak Daerah mengalami	Jurnal Ekonomi: Vol. 24, No. 3 September 2019 p-ISSN: 0853-7593 e-ISSN: 2715-6877

No.	Nama Peneliti, Tahun, dan Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
	Di Provinsi Jawa Barat)			fluktuasi setiap tahunnya sedangkan untuk Rasio Derajat Desentralisasi dan Pembangunan Manusia mengalami kenaikan setiap tahunnya. Secara parsial Rasio Derajat Desentralisasi berpengaruh positif signifikan terhadap Pembangunan Manusia. Sedangkan empat variabel independen yang lain tidak berpengaruh signifikan terhadap Pembangunan Manusia. Secara simultan semua variabel independen berpengaruh signifikan terhadap Pembangunan Manusia.	
3	Junaidi et al. (2019). "The Impact of Fiscal Decentralization on Local Economic Development in East Java"	Pembangunan Manusia	Desentralisasi Fiskal, Pertumbuhan ekonomi	Adanya pengaruh yang signifikan dan positif antara Desentralisasi Fiskal terhadap Pembangunan Manusia dan menunjukkan efek negatif antara Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Lokal.	<i>IOSR Journal Of Humanities And Social Science</i> (IOSRJHSS) Vol.13, No.1 (Jul.- Aug. 2019) PP 01-07 e-ISSN: 2279- 0837, p-ISSN: 2279-0845
4	Andriana et al. (2018). "Pengaruh Kemiskinan, dan	Indeks Pembangunan Manusia,	Kemiskinan, PDRB	Kemiskinan berpengaruh negatif dan	Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB)

No.	Nama Peneliti, Tahun, dan Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
	PDRB, dan PAD terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur”	Pendapatan Asli Daerah		signifikan terhadap IPM sedangkan PDRB berpengaruh dan signifikan terhadap IPM, PAD berpengaruh dan signifikan terhadap IPM.	Universitas Jember (UNEJ), Indonesia ISSN 2548-8945.
5	Candrawati et al. (2020). “Dampak Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera Barat”	Indeks Pembangunan Manusia	Pengangguran, Kemiskinan, Laju Pertumbuhan Ekonomi	Tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran dan laju pertumbuhan ekonomi IPM. Tingkat kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi berdampak negatif pada IPM. Pengangguran terbuka memiliki pengaruh besar terhadap IPM.	Jurnal Studi Bisnis dan Administrasi Vol. 3 No. 2 2020 ISSN:2620-794X (Online) ISSN:2621-2692 (Cetak)
6	Setyawan et al. (2019). “Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi serta Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Kasus 9 Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2008-2017)”	Belanja Modal, Indeks Pembangunan Manusia	Desentralisasi Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi	Desentralisasi Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di 9 Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2008-2017.	Jurnal Ekonomi dan Bisnis Volume 4 No 2 2019 Universitas 17 Agustus 1945 ISSN:2503-4634
7	Defitri. (2020). “Pengaruh Belanja Modal dan Belanja Pegawai terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten	Belanja Modal	Belanja Pegawai, Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	Belanja Modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Belanja Pegawai tidak berpengaruh	Jurnal Fokbis, Vol. 19, No.02 Desember 2020. ISSN 2623-2480.

No.	Nama Peneliti, Tahun, dan Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
	dan Kota di Provinsi Sumatera Barat”.			terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.	
8	Firiyani et al. (2021). “Pengaruh PAD, DAU, Belanja Modal, Belanja Pegawai terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Tengah”.	Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal	DAU, Belanja Pegawai, Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	Pendapatan Asli Daerah signifikan dan berpengaruh positif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Dana Alokasi Umum berhubungan signifikan negatif pada Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Belanja modal berhubungan negatif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Belanja Pegawai tidak berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.	Prosiding Senapan Vol. 1, No. 1.1 Mei 2021, Hal 61-69 UPN Veteran Jawa Timur ISSN 2776-2092 (Online).
9	Wahyuni et al. (2018). “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Belanja Pegawai terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Timur”.	Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal	Belanja Pegawai terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan	Pendapatan asli daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Belanja modal memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Belanja pegawai memiliki pengaruh negatif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.	Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Vol. 7 no. 6, Juni 2018 e-ISSN 2460-0585

No.	Nama Peneliti, Tahun, dan Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
10	Yusiawati et al. Marhaeni. (2020). "Effect Of Investment, GRDP Percapita, and Original Local Government Revenue on Regional Financial Independence through Capital Expenditures as Intervening Variables".	Pendapatan Asli Investasi, Daerah, Belanja PDRB per Modal	Kapita	Investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. PDRB Percapita dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Investasi dan Pendapatan Asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. PDRB per kapita tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap Belanja Modal.	<i>International Research Journal of Management, IT & Social Sciences</i> Vol. 7 No. 6, ISSN 2395-7492.
11	Rasid et al. (2023). "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Pada Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015 – 2022".	Pendapatan Asli Daerah Belanja Modal, Indeks Pembangunan Manusia	Pendapatan Asli Daerah Belanja Modal, Indeks Pembangunan Manusia	Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Belanja Modal berpengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.	Riset dan Jurnal Akuntansi. Vol. 7. No.4, ISSN 2548-507 (Print). ISSN 2548-9224 (Online).

No.	Nama Peneliti, Tahun, dan Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
12	Datail et al. (2020). "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2018".	Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal	Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus	Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.	Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Ilmu Sosial, Vol 14 No. 1. ISSN 1907-9990 (Print). ISSN 2548-7175 (Online).
13	Kanaiya et al. (2020). "Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Berpengaruh terhadap Belanja Modal Pemerintah"	Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal	DAU, DAK	Pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Dana alokasi umum berpengaruh negatif signifikan terhadap belanja modal. Dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap belanja modal.	E-Jurnal Manajemen Vol. 9 No. 3. ISSN: 2302-8912.
14	Utomo et al. (2021). " <i>The Effect of Capital Expenditures and General Allocation Funds on Local Revenue as an Intervening Variable in Districts and Cities in North Maluku Province</i> ".	Belanja Modal	DAU, Kemandirian Keuangan Daerah	Dana Alokasi Umum secara parsial tidak berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Dana Alokasi Umum secara tidak langsung berpengaruh terhadap	<i>Developing Country Studies</i> . Vol. 11. No. 4 ISSN 2225-0565 (Online).

No.	Nama Peneliti, Tahun, dan Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
				Kemandirian Keuangan Daerah melalui Pendapatan Asli Daerah. Belanja Modal secara tidak langsung berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah melalui Pendapatan Asli Daerah.	
15	Hanantoko. (2020). “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2018”.	Pendapatan Asli Dana Daerah, Belanja Perimbangan Modal, Indeks Pembangunan Manusia		Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Dana Perimbangan berpengaruh positif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Belanja Modal berpengaruh positif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal berpengaruh positif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.	Jurnal Ekonomi. Vol. 2 No. 1. ISSN 2745- 6366.
16	Indrawahyuni. (2020). “Analisis Efektivitas dan Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pendapatan	Pertumbuhan Efektivitas Pendapatan Asli PAD Daerah		Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat Efektivitas dan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kota	Jurnal AkMen Volume 17 No. 3 September 2020 Universitas

No.	Nama Peneliti, Tahun, dan Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
	Daerah Kota Makassar”			Makassar tergolong efektif, yang mana hal tersebut ditunjukkan dengan realisasi penerimaan PAD lebih besar daripada yang ditargetkan, dan pertumbuhan PAD mengalami peningkatan setiap tahunnya, dan meskipun terjadi penurunan tidak terlalu drastis.	Muhammadiyah Makassar e- ISSN : 2621- 4377
17	Marsudi et al. (2019). “Tingkat Kemandirian, Efisiensi, Efektivitas dan Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah: Kajian pada Provinsi Jawa Barat”	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	Efektivitas PAD	Hasil dari Uji pengaruh yang dilakukan menunjukkan bahwa kemandirian tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan PAD .Efisiensi berpengaruh negatif terhadap Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah. Efektivitas berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah, dan tingkat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tergolong kecil dengan nilai rata rata 28,5%, yang mana hal tersebut akibat	Jurnal AKUNIDA Volume 5 No. 2 Desember 2018 Universitas Djuanda ISSN: 2442- 3033

No.	Nama Peneliti, Tahun, dan Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
				masih belum meratanya pembangunan di setiap wilayah.	
18	Lhutfi et al. (2020). "Do the Growth of Original Local Government Revenues and the Growth of Capital Expenditure Affect Fiscal Stress"	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Belanja Modal	<i>Fiscal Stress</i>	Secara simultan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Belanja Modal secara simultan berpengaruh terhadap <i>Fiscal Stress</i> di kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat. Secara Parsial pertumbuhan PAD berpengaruh negatif terhadap <i>Fiscal Stress</i> dan Pertumbuhan Belanja Modal berpengaruh tidak signifikan terhadap belanja modal di kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat	Journal of Economics, Business, and Accountancy Ventura Vol. 23, No. 1, April – July 2020. ISSN 2355- 0627
19	Natoen et al. (2018). "Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan"	Pendapatan Asli Daerah	Pajak Daerah, Retribusi Daerah	Secara parsial variabel pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah	Jurnal Riset Terapan Akuntansi, Vol.2 No.1 2018. ISSN: 2579-969X
20	Syifa. (2021). "Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Belanja Modal	Pertumbuhan Ekonomi, <i>Fiscal Stress</i>	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif dan	JRKA Volume 7 Issue 2, Agustus 2021: 76-86.

No.	Nama Peneliti, Tahun, dan Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
	Belanja Modal Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap <i>Fiscal Stress</i> Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Barat'			signifikan terhadap <i>Fiscal Stress</i> . Pertumbuhan belanja modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>Fiscal Stress</i> . Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>Fiscal Stress</i> .	ISSN: 2684- 6853
Yogi Althariq (2024) 203403019					
Pengaruh Belanja Modal dan Pembangunan Manusia terhadap Pendapatan Asli Daerah (Survei pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022).					

2.2 Kerangka Pemikiran

Pemerintah terus berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi di setiap daerah. Daerah yang memiliki jumlah penduduk besar memerlukan pengawasan agar tidak berdampak buruk pada kesejahteraan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehingga dalam menjalankan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan di daerah, diperlukan sistem yang disesuaikan dengan permasalahan yang ada, lalu diterapkan sistem pemerintahan desentralisasi. Dengan diberlakukannya kebijakan desentralisasi, pemerintah daerah dihadapkan pada tantangan untuk mengurus dan mengelola urusan pemerintahannya secara

mandiri. Artinya, setiap pemerintah daerah dituntut untuk mengatur keuangan daerahnya sendiri, termasuk mengelola dan memaksimalkan sumber-sumber pendapatan daerah agar dapat memberikan pelayanan publik yang optimal dan mengurangi ketergantungan terhadap bantuan keuangan dari pemerintah pusat. Kesuma (2015) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang optimal akan menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat, dengan dukungan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang efisien. Menurut Erlina, dkk (2015:136) Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini adalah UU No 33 Tahun 2004. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Adapun Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah adalah analisis pertumbuhan yang dilakukan untuk mengetahui kecenderungan baik berupa kenaikan ataupun penurunan kinerja selama kurun waktu tertentu (Mahmudi, 2019:91). Analisis terhadap pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah memberikan gambaran mengenai hasil kinerja pemerintah daerah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah serta merealisasikan potensi daerah yang dapat dijadikan sumber Pendapatan Asli Daerah selama periode waktu tertentu, dengan melakukan analisis pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dapat diketahui persentase

perubahan Pendapatan Asli Daerah baik berupa peningkatan maupun penurunannya (Baihaqi, 2011:253). Indikator Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah adalah realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun dihitung dan realisasi Pendapatan Daerah tahun dihitung (Ulum, 2009:33). Peningkatan dalam Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah juga dapat dicapai dengan meningkatkan kualitas layanan publik di berbagai bidang, khususnya sektor publik. Diharapkan bahwa peningkatan kualitas layanan publik ini dapat menarik investor untuk mendirikan bisnis di daerah tersebut. Tentunya, keberhasilan dari harapan ini tergantung pada inisiatif pemerintah untuk menyediakan fasilitas yang mendukung pembangunan untuk jangka panjang. Hal ini dapat membawa manfaat bagi perekonomian dan pembangunan daerah. Akibatnya, diperlukan alokasi dana yang lebih besar dari pemerintah untuk mendukung tujuan ini. Belanja modal umumnya digunakan untuk memperoleh aset tetap yang dapat digunakan sebagai sarana pembangunan daerah.

Menurut Nordiawan dan Hertianti (2010:71) Belanja Modal adalah pengeluaran yang memanfaatkan cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan organisasi sektor publik, yang selanjutnya akan menambah anggaran operasional untuk biaya perawatannya. Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan

aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli/bangun aset (Erlina et al, 2015:158). Menurut Halim (2007:122) Belanja modal memberikan keuntungan dalam memfasilitasi hubungan lebih cepat antara pelaku ekonomi. Dengan begitu pengembangan infrastuktur dan fasilitas yang mendukung kegiatan masyarakat dapat di tingkatkan. Oleh karena itu, dana dialokasikan oleh pemerintah daerah sebagai bagian dari anggaran belanja modal dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah mereka.

Pemerintah daerah dapat melakukan pemungutan yang bersifat retribusi dan pajak atas infrastruktur yang telah dibangun untuk pelayan publik. Riduansyah (2014:50) menjelaskan Retribusi daerah, komponen lain yang juga termasuk komponen PAD, merupakan penerimaan yang diterima oleh pemerintah daerah setelah memberikan pelayanan tertentu kepada penduduk mendiami wilayah yurisdiksinya. Hal tersebut juga didukung oleh Beta Asteria (2015:60) yang menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD, Retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD, Pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap PAD. Sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, terutama Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah.

Menurut Hendarmin (2019), Belanja Modal memiliki dampak pada pembangunan, terutama dalam aspek pembangunan manusia. Sektor Kesehatan dan Pendidikan yang merupakan dasar dari pembangunan manusia. Hal tersebut diperkuat oleh UNDP (1995) pembangunan manusia adalah proses perluasan pilihan manusia, pada semua level pembangunan, terdapat tiga pilihan mendasar

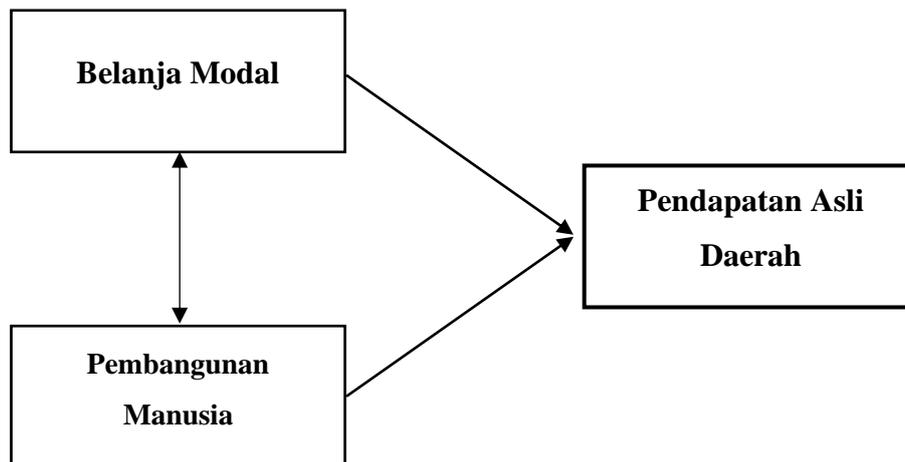
yang harus dipenuhi, yaitu untuk hidup sehat dan panjang umur, memperoleh pendidikan, dan memiliki akses terhadap sumber-sumber kebutuhan agar dapat hidup layak. Pilihan manusia sangat banyak dan berubah setiap saat, namun ketiga pilihan mendasar tersebut tetap menjadi prioritas dalam setiap level pembangunan. Pembangunan manusia terdiri dari dua sisi yang saling mendukung, yaitu pembentukan kapasitas manusia dan pemanfaatannya. Pembentukan kapabilitas manusia mencakup upaya peningkatan kesehatan, pendidikan, dan kemampuan ekonomi, sedangkan pemanfaatannya mencakup penggunaan kapabilitas yang dimiliki, seperti menikmati waktu luang, untuk tujuan produktif.

Sehingga dapat menghasilkan kualitas sumber daya manusia yang baik. Karena pembangunan manusia melibatkan peningkatan kesehatan, pendidikan, dan kemampuan ekonomi. Dalam Undang-undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2007, Pembangunan pendidikan dan kesehatan merupakan investasi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga penting perannya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut sejalan dengan Kesuma (2015) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang optimal akan menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat, dengan dukungan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang efisien. Pembangunan Sumber Daya Manusia memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan manusia Indonesia yang maju dan mandiri sehingga mampu berdaya saing dalam era globalisasi. Dalam kaitan itu, pembangunan manusia diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang antara lain ditandai dengan

meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (Undang-undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2007).

Namun Indeks Pembangunan Manusia juga dapat meningkat dari faktor fasilitas yang telah disediakan pemerintah dalam upaya pembangunan fasilitas publik dari anggaran Belanja Modal. Sehingga pemerintah menyediakan fasilitas Pendidikan, Kesehatan, serta pembangunan fasilitas publik lainnya. Dari pembangunan fasilitas tersebut dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Seperti Masyarakat lebih sehat, Pendidikan tinggi, dan lain-lainnya. Hal tersebut dapat memberikan output yang cukup banyak salah satunya meningkatkan produktivitas Masyarakat, hal tersebut dapat menjadi faktor untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Selain itu, kehadiran investor juga dapat mendorong pertumbuhan sektor ekonomi di daerah. Dengan adanya investasi, perusahaan dapat membuka lapangan kerja baru, meningkatkan produktivitas, dan memperluas jaringan bisnis. Hal ini tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat lokal melalui kesempatan kerja, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Dari sana, pendapatan masyarakat akan meningkat, serta pemasukan ke daerah juga meningkat. Maka dari itu, pembangunan manusia sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi daerah, terutama pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap informasi, daerah dapat mengoptimalkan potensi ekonomi dan meningkatkan PAD. Semakin baik kualitas manusia di suatu daerah, semakin besar kontribusi mereka terhadap pembangunan dan kemakmuran daerah tersebut.

Berdasarkan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen yang telah dipaparkan, maka kerangka pemikiran mengenai variable yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Karena sifatnya masih sementara maka perlu dibuktikan kebenarannya melalui data yang terkumpul. Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis mengajukan hipotesis penelitian sebagai berikut :

1. Belanja Modal dan Pembangunan Manusia secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022.
2. Belanja Modal dan Pembangunan Manusia secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022.